

BAB 4

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Menurut Teori Dependensi, ketergantungan dianggap sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga yang miskin akibat sumber daya ekonominya didominasi oleh negara-negara maju. Sebagai hasilnya, negara miskin ini menjadi terbelakang, miskin, dan kondisi politik ekonominya tidak stabil (*Wikipedia 2009; Sociology Dictionary 1991*).

Sebagai salah satu tokoh teori dependensi, Theotonio Dos Santos juga memunculkan perspektif dependensinya dalam menganalisa dependensi sebagai suatu struktur hubungan antara negara maju yang dominan (*dominant countries*) dan negara miskin (*dependent countries*) yang ter subordinasi dalam suatu sistem ekonomi dunia. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung kepada negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “Pusat - Periferi” (*Santos 1973; Widodo 2008*).

Melihat perspektif Teori Dependensi ini, bisa dilihat persamaan kondisi antara Okinawa dan Negara Dunia Ketiga, yaitu sebagai negara periferi yang didominasi oleh negara pusatnya, namun karena Okinawa bukanlah suatu negara, melainkan salah satu propinsi di Jepang, maka bisa diibaratkan bahwa Okinawa merupakan propinsi periferi, dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Jepang. Okinawa dianggap sebagai negara periferi, karena perekonomian mereka didominasi oleh kebijakan politik ekonomi negara pusatnya, yaitu Jepang, ”bekerja sama” dengan Amerika Serikat, yang mempunyai kepentingan terhadap Jepang. Dominasi ini kemudian membuat suatu Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang.

Menurut Glenn D. Hook dan Richard Siddle, Struktur ekonomi dependensi yang terjadi di Okinawa, yaitu antara Okinawa dan Jepang adalah suatu struktur yang membuat ekonomi Okinawa tergantung kepada pendapatan dari basis-basis militer Amerika di satu sisi, dan di sisi lain, propinsi Okinawa juga tidak bisa

lepas dari subsidi dan investasi pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek pekerjaan umum (konstruksi), dan industri turisme (3-8). Tiga pendapatan utama yang mempengaruhi perekonomian Okinawa ini lazim disebut 3K yaitu *Kichi* (基地; basis militer), *Koukyou kouji* (公共工事; proyek pekerjaan umum), dan *Kankou* (観光; industri turisme) (Sri Ayu Wulansari 2008: 3).

Okinawa yang tidak mempunyai sumber daya ekonomi yang mencukupi, mau tidak mau menerima bantuan ekonomi berupa subsidi dan investasi (補助金・政府支出) dari pemerintah pusat Jepang berupa proyek konstruksi umum (公共工事) senilai 276,8 milyar yen (Okinawa Ken Kikakubu Toukeika 2004) dan industri pariwisata (観光産業) yang sekarang menjadi pengharapan bagi perekonomian propinsi karena telah menghasilkan sekitar 407,1 miliar yen pada tahun 2005 (Official Website Okinawa Prefecture 2008). Namun, dengan adanya subsidi ini, maka perekonomian Okinawa semakin tergantung kepada pemerintah pusat Jepang. Selain itu, perekonomian propinsi Okinawa juga tergantung kepada pendapatan dari basis militer Amerika Serikat (米軍基地関係収入) yang telah menyumbang 200,6 miliar yen pada tahun 2005, termasuk uang sewa²⁹ (軍用地料) kepada 33.309 *landowners* (地主) di Okinawa (Official Website Okinawa Prefecture 2008).

Kehadiran basis militer Amerika Serikat memang turut andil dalam perekonomian Okinawa, namun pada kenyataannya, kehadiran basis militer AS pun kini hanya menyumbang 5% dari perekonomian lokal dari 15% pada tahun 1972 (“Okinawa”). Di propinsi Okinawa sendiri, ketergantungan ekonomi yang paling besar adalah ketergantungan ekonomi terhadap subsidi atau investasi dari pemerintah pusat Jepang dalam hal proyek konstruksi umum dan industri turisme. Walaupun begitu, masyarakat Okinawa yang pro terhadap basis militer AS tetap khawatir apabila basis militer ini dihilangkan dari Okinawa, karena tanpa basis militer tersebut, maka mata pencaharian mereka akan hilang, dan mereka tidak siap untuk menjadi salah sekian dari ratusan pengangguran di propinsi Okinawa saat ini, apalagi dengan adanya krisis global yang melanda dunia baru-baru ini.

²⁹Uang sewa lahan tempat berdirinya basis militer ini merupakan tanggung jawab pemerintah Jepang. Dari laporan US Forces Japan Okinawa Area Field Office pada Januari 2005, pemerintah Jepang bertanggung jawab atas 70% dari total pengeluaran basis militer AS di Okinawa (Johnston 2006)

Dengan hanya mengandalkan subsidi dan investasi dari pemerintah pusat Jepang, Okinawa menjadi prefektur yang termiskin diantara prefektur lainnya di Jepang. Dari data yang dikeluarkan oleh Dari data yang dikeluarkan oleh *Department of National Accounts, Economic and Social Research Institute Japan* (内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部) pada tahun 2004, Okinawa berada di urutan terendah dalam hal pendapatan per kapita (一人当たり県民所得). Dibanding dengan urutan tertinggi, yaitu Tokyo yang mencapai 52.772 dolar/tahun, Okinawa hanya mencapai 23.000 dolar/tahun (*Statistics Bureau Japan: Japan Statistical Yearbook 2008*). Selain itu, pendapatan penduduk di prefektur Okinawa hanya 72% dari angka rata-rata pendapatan penduduk di prefektur lainnya di Jepang. Rata-rata tingkat pengangguran (平均失業率) di Okinawa juga paling tinggi di Jepang, yaitu sekitar 7,4% (*Official Website Okinawa Prefecture 2009*) dari total jumlah penduduk Okinawa sebesar 1,37 juta jiwa pada tahun 2008 (*Okinawa Statistics Division 2009*). Angka ini kira-kira hampir 2 kali lebih banyak dari pada angka rata-rata di Jepang. Tingkat pengangguran yang paling tinggi dialami oleh kalangan muda yang berumur sekitar 15-24 tahun, dengan persentase 13,8% dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu 7,4% untuk kelompok usia yang sama.

Pada akhirnya, akibat dari Struktur Ekonomi Dependensi antara Okinawa dan Jepang ini, perekonomian propinsi Okinawa tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap subsidi dan investasi, yang bersifat sementara, dari pemerintah Jepang, serta tidak juga bisa menghindari keberadaan raksasa basis militer Amerika Serikat di wilayahnya, karena eksistensi basis militer Amerika pun merupakan bagian dari dominasi kebijakan politik ekonomi pemerintah pusat Jepang yang mengutamakan hubungan kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat.

4.2 Saran

Kondisi Ketergantungan Ekonomi terhadap Pemerintah pusat Jepang yang dialami oleh propinsi Okinawa merupakan hasil dari dominasi dari kebijakan politik ekonomi Negara Jepang. Menurut Theotonio dos Santos, ketergantungan

suatu Negara akan mengakibatkan keterbelakangan pembangunan di dalam negerinya., namun sejalan dengan perkembangan Teori Dependensi, muncul berbagai kritik, terutama dari para teoritis perspektif modernisasi (*Suwarsono 1991: 128-132*). Salah dua dari kritik terhadap teori dependensi itu adalah:

1. Teori Dependensi memiliki kecenderungan untuk menganalisa dan menetapkan persoalan ketergantungan di negara-negara Dunia Ketiga secara global dengan mengabaikan faktor-faktor keunikan sejarah di masing-masing negara yang mungkin saja justru menjadi faktor yang menentukan bentuk dan arah pembangunan yang khas yang seharusnya diikuti oleh negara tersebut.
2. Situasi ketergantungan tidak selalu harus membawa keterbelakangan. Ketergantungan dan pembangunan dapat saja mewujud secara bersamaan dan membawa kemajuan.

Sebagai tanggapan terhadap kritik-kritik yang dilontarkan tersebut, Teori Dependensi secara perlahan dan dalam batas-batas tertentu merubah beberapa asumsi dasar, penjelasan pokok dan metode kajian yang digunakan. Beberapa asumsi dasar yang mengalami perubahan terwujud dalam suatu Teori Dependensi Baru.

Asumsi-Asumsi Dasar Teori Dependensi Baru (*Hagen Koo 1987*) ini adalah sebagai berikut:

1. Situasi ketergantungan adalah suatu situasi yang memiliki batas ruang dan waktu sehingga selalu memiliki ciri yang unik dan khas secara historis.
2. Faktor internal juga memiliki andil dalam melahirkan situasi ketergantungan, dan karenanya ketergantungan juga merupakan persoalan sosial-politik, sehingga bukan semata-mata sebagai persoalan ekonomi.
3. Situasi ketergantungan tidak selamanya bertolak belakang dengan pembangunan. Ada kemungkinan terjadinya koeksistensi antara ketergantungan dan pembangunan yang dapat menciptakan situasi ketergantungan yang lebih dinamis.

Beralih pada kondisi Okinawa saat ini, kemungkinan asumsi dasar teori dependensi baru ini bisa diaplikasikan pada struktur ketergantungan ekonomi yang terjadi di Okinawa. Secara historis, Negara Jepang memang menganut sistem desentralisasi ekonomi, dimana 47 propinsi di Jepang harus mengacu pada

kebijakan politik maupun ekonomi dari Jepang atau Tokyo sebagai pusatnya. Begitu juga dengan Okinawa, sebagai salah satu dari ke-47 propinsi yang ada di Jepang, perekonomian mereka sudah tentu harus berpijak pada kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat Jepang. Sehingga bisa dianggap, semua propinsi di Jepang mengalami ketergantungan terhadap kebijakan dari pemerintah pusat Jepang. Namun, yang menjadi masalah adalah Okinawa sebagai propinsi periferi, yang ter subordinasi oleh relasi kuasa antara Jepang dan Amerika, situasi ketergantungan ini membuat kemajuan perekonomian Okinawa menjadi terhambat secara sengaja, dibandingkan propinsi lainnya di Jepang, yang walaupun sama-sama mengalami ketergantungan, namun masih bisa mengembangkan perekonomian propinsi mereka, sehingga terhindar dari kondisi keterbelakangan pembangunan dan tingginya tingkat pengangguran di wilayah mereka.

Menurut asumsi dasar dari teori dependensi baru, situasi ketergantungan tidak selamanya bertolak belakang dengan pembangunan. Ada kemungkinan terjadinya koeksistensi antara ketergantungan dan pembangunan yang dapat menciptakan situasi ketergantungan yang lebih dinamis. Situasi ketergantungan seperti ini telah dialami oleh propinsi-propinsi di Jepang, kecuali Okinawa. Namun, Okinawa masih bisa menciptakan situasi seperti itu, apabila ada suatu kerjasama dan komunikasi antara pemerintah Jepang dan pemerintah Okinawa untuk membuat kesepakatan bahwa pemerintah pusat Jepang seharusnya mengubah dan mengeliminasi segala kebijakan dan peraturan, serta segala hambatan yang dapat menghambat pembangunan dan perekonomian di propinsi Okinawa. Dengan adanya komunikasi yang baik ini, bukan tidak mungkin dapat menciptakan situasi ketergantungan yang dinamis antara negara pusat dan propinsi periferinya, sehingga masalah ekonomi, politik, dan sosial yang membuat propinsi Okinawa menjadi propinsi paling miskin, terbelakang, dan ter subordinasi dibandingkan ke-46 propinsi yang lain di Jepang dapat diselesaikan.